

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	1
1.3. Tujuan Penelitian .....	16
1.4. Manfaat Penelitian .....	16
1.5. Metode Penelitian.....	16
1.5.1. Tipe Penelitian.....	16
1.5.2. Pendekatan Masalah .....	17
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	17
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	19
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	20
<b>BAB II KONSEP POLITIK IDENTITAS DALAM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA</b> .....	22
2.1. Konsep Politik Identitas .....	22
2.1.1. Konsep Identitas .....	22
2.1.2. Definisi Politik Identitas.....	26
2.1.3. Kritik Politik Identitas .....	30
2.1.4. Definisi Korban .....	35

2.2.	Identitas dalam Hak Asasi Manusia Internasional .....	39
2.2.1.	Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.....	39
2.2.2.	Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik .....	41
2.2.3.	Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial .....	45
2.3.	Politik Identitas Hukum Nasional .....	52
2.3.1.	Dalam Tinjauan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.....	52
2.3.2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	54
2.3.3.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis .....	58
<b>BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA TERHADAP KORBAN POLITIK IDENTITAS.....</b>		<b>62</b>
3.1.	Negara Hukum .....	62
3.2.	Tinjauan Konstitusi .....	67
3.3.	Konsep Demokrasi .....	73
3.4.	Kewenangan Komnas HAM .....	78
3.5.	Konflik yang Disebabkan Politik Identitas .....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>90</b>
4.1.	Kesimpulan .....	90
4.2.	Saran.....	92
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>		<b>93</b>

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886;
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208) Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919;
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635;
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

## **INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL**

1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
2. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;
3. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.